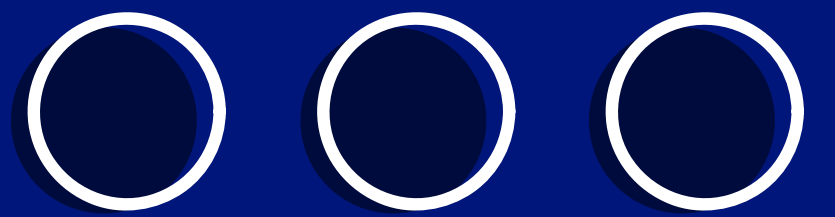


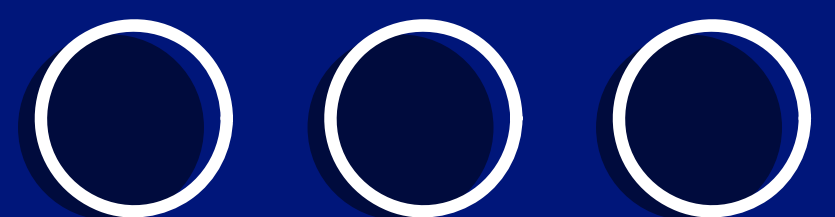


PERUBAHAN RENCANA KERJA



TAHUN ANGGARAN

20
25



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
JL. KOLONEL WAHID UDIN NO 257, KEC. SEKAYU



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Lingkungan I telp. 321013-321064
SEKAYU (30711)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 68 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah secara terencana dan terukur, diperlukan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyusun Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 264 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

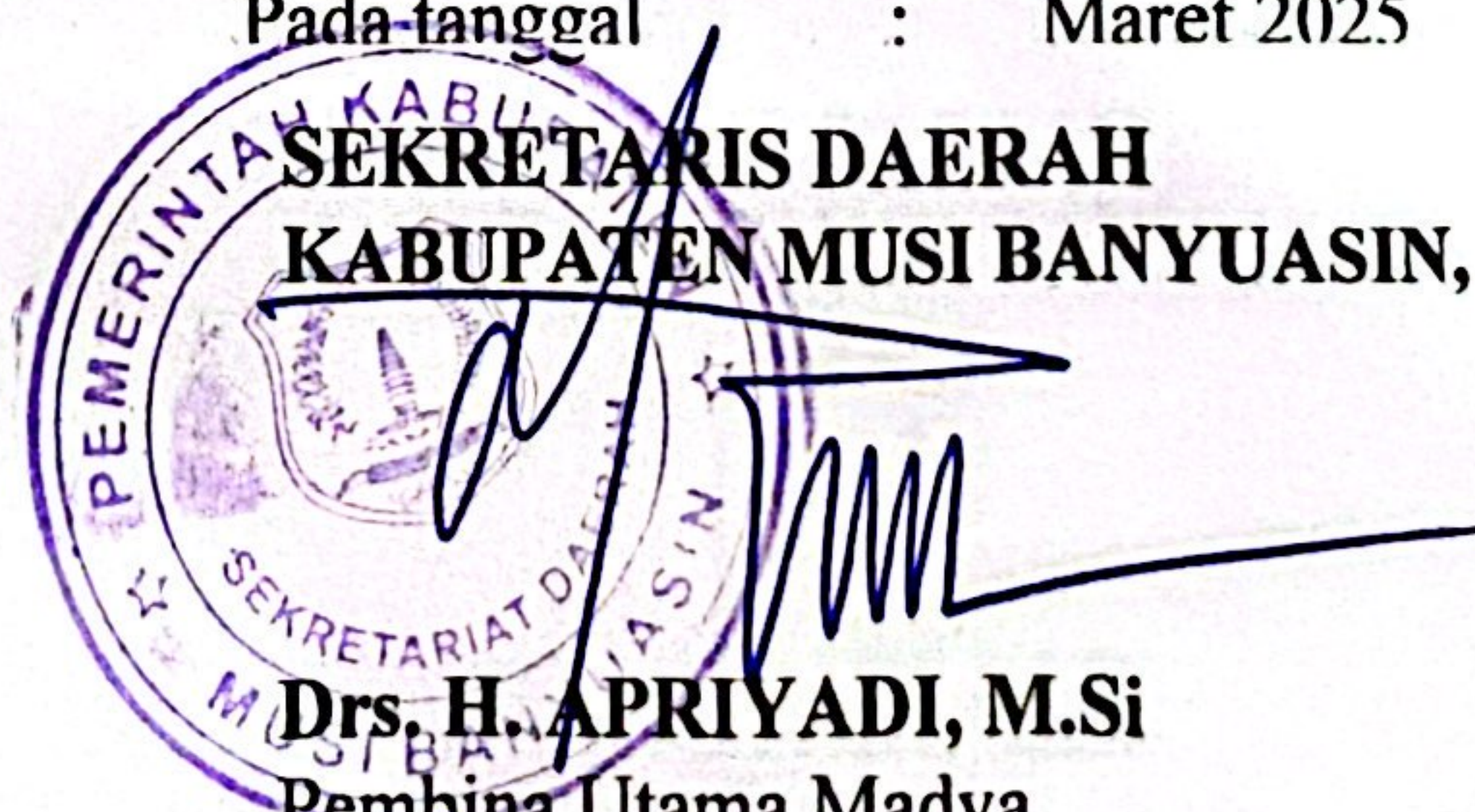
Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- Melakukan pemetaan pembagian tugas pada anggota tim penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Mengumpulkan, mengolah data, dan menganalisa data yang berkaitan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Menyusun, mereview dan mencetak dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
 - Melakukan Koordinasi dan Konsultasi internal dan eksternal ke Instansi terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
 - Menyampaikan dokumen perubahan Renja yang telah final kepada Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sekayu

Pada tanggal : Maret 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671106 198703 1 001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Musi Banyuasin

Nomor : 68 Tahun 2025

Tanggal : Maret 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Melvi Rosmaini, S.P, M.Si	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Ketua
2	Rustam Efendi, S.E, M.Si	PPK SKPD	Sekretaris
3	1. Suganda, AP., M.Si 2. Herianto, S.Pd.I, M.Si 3. Romasari Purba, SH., M.Si 4. Dicky Meiriando, S.STP, M.H 5. Muhamad Aswin, S.STP.,MM 6. Firdaus Paku Alam, S.H, M.Si 7. Erdiansyah, S.P, M.Si 8. Yulius Adi, S.STP., M.Si 9. Seprizal, S.E, M.Si 10. Hj. Nurzahrawati, S.Pd., MT 11. Muhammad Agung Perdana, S.STP, M.Si	1. Kabag. Tata Pemerintahan 2. Kabag. Kesejahteraan Rakyat 3. Kabag. Hukum 4. Kabag. Kerjasama 5. Kabag. Perekonomian 6. Kabag. Administrasi Pembangunan 7. Kabag. Pengadaan Barang dan Jasa 8. Kabag. Sumber Daya Alam 9. Kabag. Umum 10. Kabag. Organisasi 11. Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Koordinator
4	1. Eliyus Wandriani, SE 2. Desty Fillia Rahma, SE 3. Hemalia Putri, SE 4. Rustamal Angriajaya, SH 5. Dita Ardina Maharani, A.Md.Ak 6. Romidah G, A.Md.Ak 7. Hapsa Yulia Saipul 8. Sobri 9. Nuroida, SE 10. I Putu Andry S. 11. Fadhli Herdiansyah, S.IP 12. Hendriyansa. S.F 13. Arief Aprilyadi, S.IP	1. Penata Keuangan 2. Analis Perencanaan Anggaran 3. Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan 4. Bendahara Pengeluaran 5. Pengelola Kegiatan dan Anggaran 6. Pengeioia Akuntansi 7. Verifikator Keuangan 8. Pramu Bakti 9. Analis Laporan Keuangan 10. Pengadministrasi Perkantoran 11. Perencana Ahli Pertama 12. Penata Layanan Operasional 13. Penata Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan : Sekayu
Pada tanggal : Maret 2025

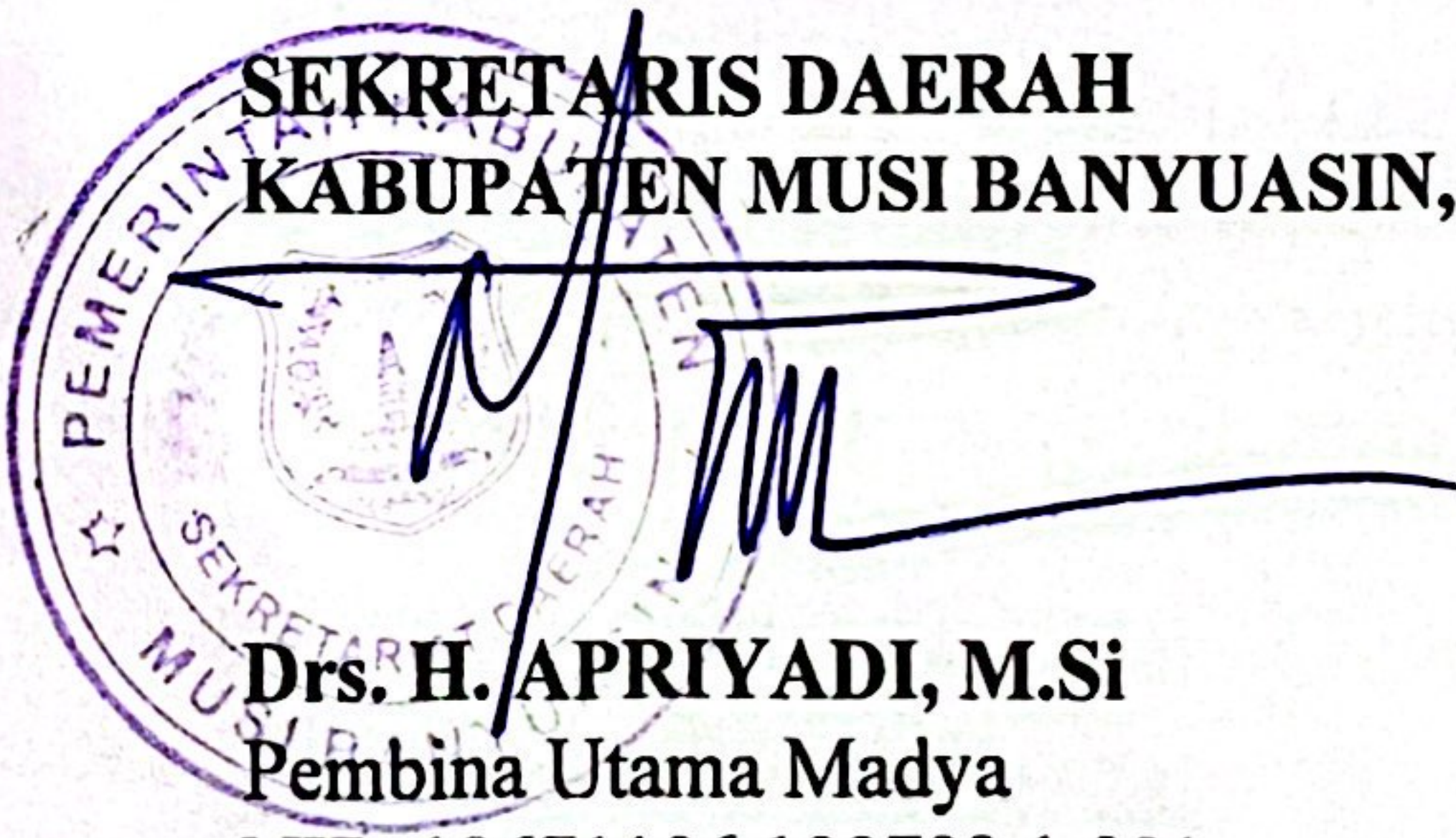

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**
Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671106 198703 1 001

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Musi Banyuasin
Nomor : 68 Tahun 2025
Tanggal : Maret 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

AGENDA KERJA
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Penyusunan Kebijakan Perubahan Renja-PD / RKPD (SE Perubahan RKPD dan Renja-PD 2025)	Minggu II-III Maret 2025
2.	Usulan Perubahan Renja-PD 2025	Minggu III-IV Maret 2025
3.	Verifikasi / Pembahasan Usulan Perubahan Renja-PD 2025 dan input SIPD (Ratek)	Minggu I – Minggu III April 2025
4.	Finalisasi Rancangan Perubahan Renja-PD (TAPD)	Minggu I Mei 2025
5.	Review APIP dan Fasilitasi Provinsi	Minggu II – III Mei 2025
6.	Penetapan Perubahan RKPD dan Renja-PD	• P- RKPD: Minggu IV Mei 2025 • Perubahan Renja-PD 1 bulan setelah penetapan P-RKPD 2025 (Minggu Keempat Bulan Juli 2025)

Ditetapkan : Sekayu
Pada tanggal : Maret 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671106 198703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kol. Wahid Udin No. 257 Lingkungan I telp. 321013-321064
SEKAYU (30711)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 69 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 30/KPTS/SETDA/XII/2024 TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan penyesuaian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B 000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tanggal 10 Maret 2025, perangkat daerah dapat menyusun perubahan Renja sebagai tindak lanjut terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 264 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026;

13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberlakukan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Bulan Mei Tahun 2025
- 2.3 Isu Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Terutama dalam Mendukung Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

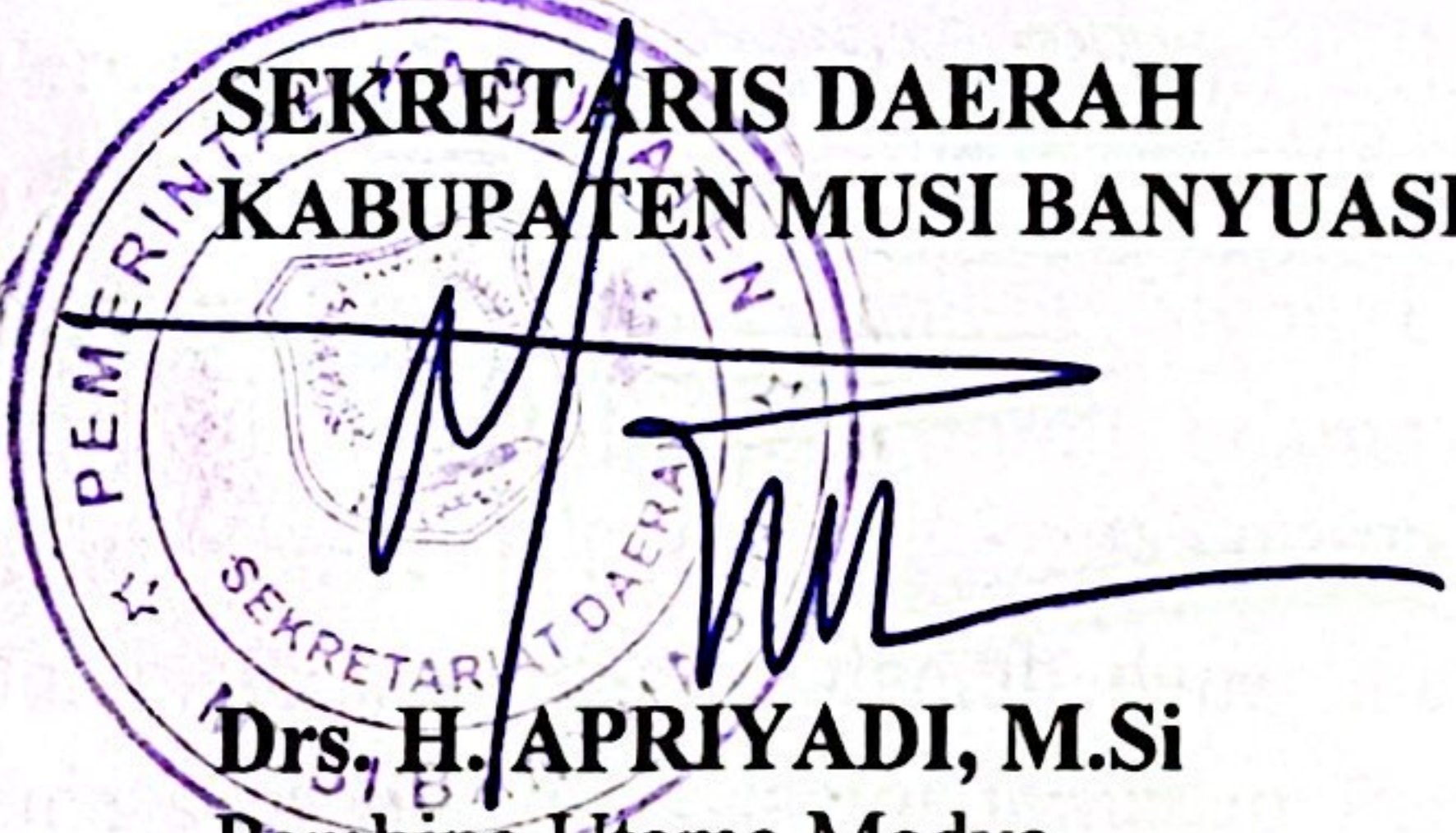
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB IV PENUTUP

- KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sekayu
Pada tanggal : Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**
Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671106 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2025 serta penyesuaian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025. Perubahan ini juga mengacu pada Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-000.7.2.4/069/BAPPEDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi administratif, perumusan kebijakan umum, dan penyusunan kebijakan strategis kepala daerah, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen Perubahan Renja ini disusun dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta sinkronisasi dengan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada



Tim Penyusun, seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta koordinasi yang dilakukan bersama Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**

PARAF HIERARKI	
AŞISTEN III BIDANG ADMINİSTRASI UMUM	
KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	


Drs. H. APRIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671106 198703 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, guna mendukung keterpaduan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terdiri atas empat tahapan, yaitu: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, serta evaluasi kinerja. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan dan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, transparan, dan konsisten.

Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan setiap daerah menyusun rencana pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan, baik dalam bentuk rencana jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Setiap daerah wajib memiliki RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD.

Bersamaan dengan penyusunan RKPD, Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan RAPBD, KUA, dan PPAS.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan. Dokumen ini bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun untuk mendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023–2026.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis, guna menjamin keterpaduan serta konsistensi antara perencanaan tahunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Adapun tahapan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan

Tahap awal ini diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renja Perubahan Sekretariat Daerah melalui Surat Keputusan Sekretaris

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 18 Januari 2025. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan adanya struktur kerja yang jelas serta pembagian tanggung jawab yang terorganisir di antara aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Setelah tim terbentuk, dilaksanakan kegiatan orientasi dan penyamaan persepsi bagi seluruh anggota tim. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai substansi dan tata cara penyusunan Renja Perubahan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar analisis. Data tersebut mencakup capaian kinerja tahun sebelumnya, kondisi pelayanan terkini, isu-isu strategis perangkat daerah, serta proyeksi kebutuhan tahun perencanaan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif guna menjamin akurasi serta relevansi informasi yang dihimpun.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Rancangan awal Renja Perubahan disusun dengan berlandaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024. Pada tahap ini, dilakukan kajian terhadap berbagai capaian program dan kegiatan sebelumnya, untuk menilai efektivitas pelaksanaan, efisiensi penggunaan anggaran, serta ketercapaian indikator kinerja utama perangkat daerah.

Analisis pelayanan juga dilakukan guna menggambarkan kondisi aktual pelayanan publik yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, baik dari sisi output, outcome, maupun permasalahan yang masih menjadi kendala. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, sasaran, dan prioritas program/kegiatan yang lebih tajam dan terukur.

3. Penyusunan Rancangan Renja

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi pada tahap sebelumnya, disusunlah rancangan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025. Dokumen ini memuat perumusan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kebutuhan pendanaan, lokasi pelaksanaan, serta kelompok sasaran yang hendak dicapai. Seluruh komponen tersebut disusun dengan pendekatan berbasis hasil (result-based planning), sehingga tidak hanya menggambarkan rencana belanja, tetapi juga output dan outcome yang ingin diwujudkan.

Penyusunan rancangan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara rencana tahunan, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD, agar selaras secara vertikal dan horizontal dalam sistem perencanaan daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai wadah konsultasi publik dan koordinasi antarunit kerja di lingkup Sekretariat Daerah maupun lintas perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk memperoleh

masukan, klarifikasi, dan sinkronisasi terhadap target kinerja, program, kegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran dalam rancangan Renja.

Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan usulan yang relevan, sehingga dokumen Renja Perubahan yang disusun benar-benar bersifat partisipatif dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi sarana penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan.

5. Penetapan Rencana Kerja

Setelah melalui serangkaian proses penyusunan dan konsultasi, Rancangan Akhir Renja Perubahan Sekretariat Daerah disusun dan disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen final tersebut memuat keseluruhan hasil penyusunan, termasuk justifikasi kegiatan, prioritas pendanaan, serta penajaman indikator kinerja. Penetapan dilakukan setelah diverifikasi dan disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran daerah.

6. Implementasi Rencana Kerja

Pelaksanaan dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan tahap krusial yang menentukan keberhasilan seluruh proses perencanaan. Agar implementasi berjalan optimal, diperlukan dukungan ketersediaan anggaran yang memadai serta komitmen penuh dari seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar tetap berada dalam jalur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi bagian integral dari mekanisme pengendalian dan pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Dalam rangka memenuhi semua ketentuan normatif aturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan daerah, perlu dilakukan sinergisitas dalam rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahun dan memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah setiap lima tahun sekali;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah

Berfungsi sebagai penjabaran RPJP Daerah dan memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah masa kini, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang diharapkan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Lima Tahunan secara lintas pembiayaan, baik pembiayaan atas indikasi rencana program yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Musi Banyuasin;

c. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

Berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap Perangkat Daerah, yang memuat Gambaran Pelayanan Masa Kini, Gambaran Pelayanan yang diharapkan, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan setiap Bidang Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Banyuasin;

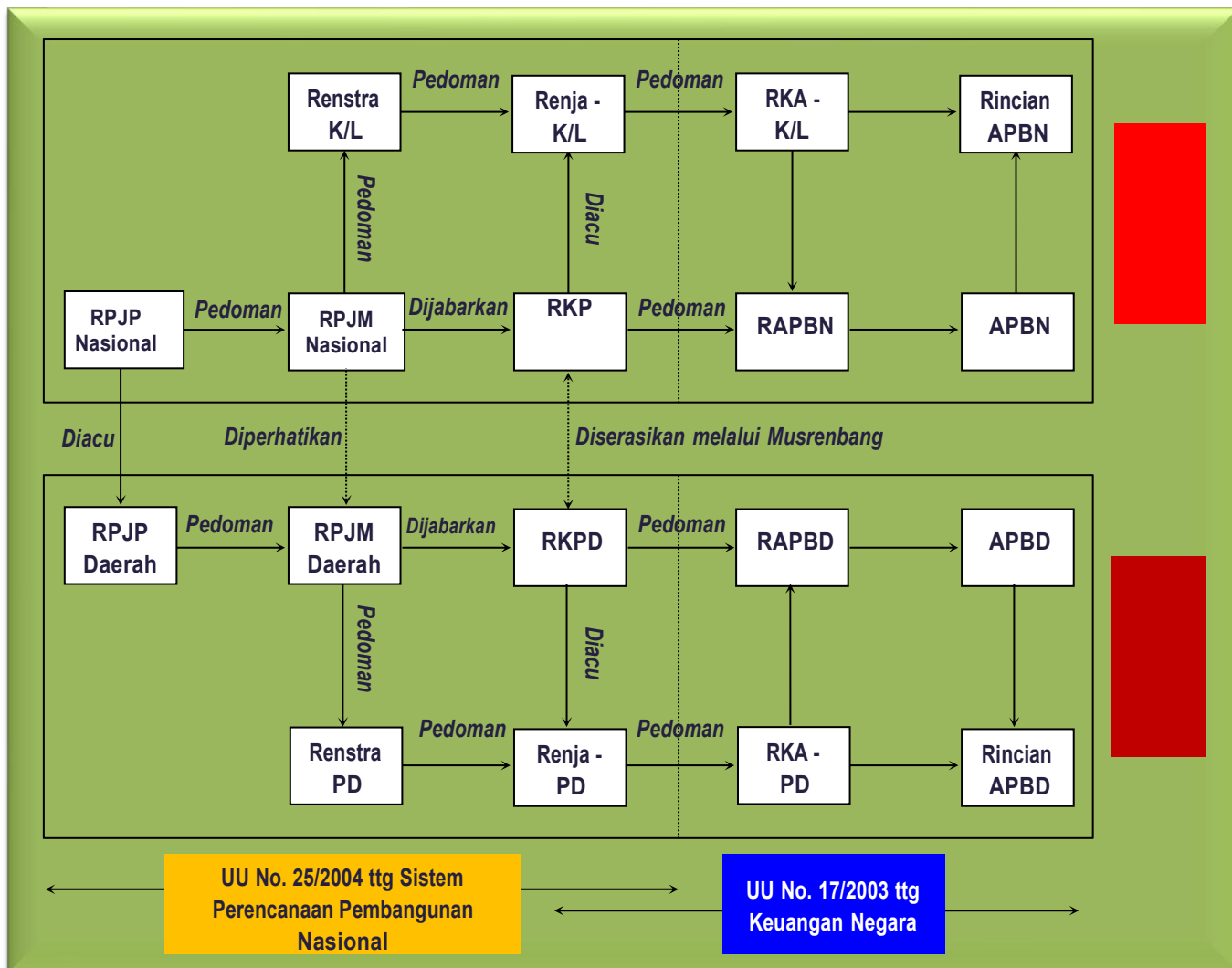
d. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah, Renja PD disusun sebagai tindak lanjut Renstra PD yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya;

e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Renja PD setiap tahun anggaran dan merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (**Musrenbang**) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

Adapun gambaran hubungan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan dokumen perencanaan lainnya tercermin pada gambar berikut :



Gambar 1.1.

Hubungan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah
Pusat



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang SAKIP;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Bidang Keuangan Daerah;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 264 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.
23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.
24. SE No. B-000.7.2.4/069/BAPPEDA 2025 tentang Penyusunan Perubahan Renja PD sebagai Tindaklanjut terhadap Penyesuaian Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Kab. Muba Tahun 2025.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk satu tahun anggaran, yaitu :

1. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan publik, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan lembaga Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Mengarahkan program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama 1 (satu) tahun dengan memberikan masukan bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan garis besar isi dokumen Renja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

➤ **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin serta sistematika penulisan Renja.

➤ **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, serta analisis kinerja pelayanan, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan sasaran target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

➤ **BAB IV. PENUTUP**

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024 DAN CAPAIAN TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2024. Evaluasi Rencana Kerja 2024 dilakukan terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 secara umum selaras dengan Renja Sekretariat Daerah 2024. Adapun sifat-sifat kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) Menunjang program nasional;
- 2) Persiapan pekerjaan fisik tahun yang akan datang;
- 3) Kegiatan dengan dasar petunjuk dari pemerintah daerah.

Hasil Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PENYERAPAN KEUANGAN	
			(Rp)	(%)
	2	3	11	12
	Sekretariat Daerah	160.688.173.184,00	131.448.103.272,00	81,8
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	122.543.027.582,00	104.869.438.155,00	85,58
I	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.840.000,00	81.632.000,00	94
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.420.000,00	40.790.000,00	93,94
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	43.420.000,00	40.842.000,00	94,06
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.478.372.373,00	24.146.404.416,00	79,22
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	30.478.372.373,00	24.146.404.416,00	79,22
III	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1.078.373.294,00	823.961.002,00	76,41
1	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	943.551.712,00	756.104.395,00	80,13
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	134.821.582,00	67.856.607,00	50,33
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	828.565.800,00	420.149.190,00	50,71
1	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120.309.800,00	96.224.548,00	79,98
2	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	708.256.000,00	323.924.642,00	45,74
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.107.596.013,00	23.755.732.911,00	87,63
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	349.991.600,00	346.885.900,00	99,11
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	7.057.719.932,00	6.800.794.854,00	96,36
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.093.914.400,00	2.048.686.600,00	97,84
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.241.291.399,00	1.164.522.950,00	93,82

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.050.499.992,00	669.654.816,00	63,75
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	107.587.300,00	71,72
7	Penyediaan Bahan/material	45.680.000,00	45.000.000,00	98,51
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.720.000.000,00	7.259.674.896,00	83,25
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	6.398.498.690,00	5.312.925.595,00	83,03
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.903.347.852,00	5.951.237.371,00	75,3
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	6.333.442.802,00	4.565.897.371,00	72,09
2	Pengadaan Mebel	1.569.905.050,00	1.385.340.000,00	88,24
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.568.328.696,00	19.400.311.921,00	89,95
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.276.992.608,00	5.746.679.822,00	78,97
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.291.336.088,00	13.653.632.099,00	95,54
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.960.693.047,00	12.606.845.180,00	90,3
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	5.012.760.000,00	4.366.131.161,00	87,1
2	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	5.673.453.047,00	5.300.168.769,00	93,42
3	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3.274.480.000,00	2.940.545.250,00	89,8
IX	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1.532.297.000,00	1.419.882.400,00	92,66
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	182.547.000,00	79.682.400,00	43,65
2	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	749.750.000,00	740.200.000,00	98,73
3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	100
X	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.375.680.080,00	8.052.001.612,00	96,14

1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.471.963.080,00	6.194.333.559,00	95,71
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.903.717.000,00	1.857.668.053,00	97,58
XI	Penataan Organisasi	2.554.097.288,00	1.884.534.895,00	73,78
1	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	628.624.834,00	494.366.230,00	78,64
2	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	610.786.822,00	340.878.383,00	55,81
3	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	940.187.482,00	736.659.422,00	78,35
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	374.498.150,00	312.630.860,00	83,48
XII	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	7.068.836.139,00	6.326.745.257,00	89,5
1	Fasilitasi Keprotokolan	2.391.624.000,00	2.146.924.069,00	89,77
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.416.790.431,00	3.945.075.950,00	89,32
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	260.421.708,00	234.745.238,00	90,14
B	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	35.805.726.942,00	24.637.031.223,00	68,81
XIII	Administrasi Tata Pemerintahan	2.117.498.416,00	1.003.494.921,00	47,39
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.589.417.100,00	669.107.300,00	42,1
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	142.711.600,00	86.627.000,00	60,7
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	385.369.716,00	247.760.621,00	64,29
XIV	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	32.296.831.590,00	22.625.661.243,00	70,06
5	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	28.808.330.440,00	20.140.924.640,00	69,91
6	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	66.628.250,00	0	0
7	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	3.421.872.900,00	2.484.736.603,00	72,61
XV	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.002.763.936,00	730.014.277,00	72,8
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	209.129.755,00	208.446.779,00	99,67
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	656.297.388,00	386.548.706,00	58,9
3	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	137.336.793,00	135.018.792,00	98,31
XVI	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	388.633.000,00	277.860.782,00	71,5

1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	183.407.000,00	165.998.545,00	90,51
2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	173.480.000,00	84.624.444,00	48,78
3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	31.746.000,00	27.237.793,00	85,8
C	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.339.418.660,00	1.941.633.894,00	83
XVII	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	369.691.000,00	345.723.931,00	93,52
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumda Dan Blud	140.472.000,00	130.626.648,00	92,99
2	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	111.449.000,00	110.393.156,00	99,05
3	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	117.770.000,00	104.704.127,00	88,91
XVIII	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	992.070.660,00	801.106.571,00	80,75
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	601.990.660,00	545.783.971,00	90,66
2	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	253.288.000,00	202.989.000,00	80,14
3	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	136.792.000,00	52.333.600,00	38,26
XIX	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	454.273.000,00	336.492.850,00	74,07
1	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	150.390.000,00	148.654.166,00	98,85
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	136.268.000,00	123.154.084,00	90,38
3	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	167.615.000,00	64.684.600,00	38,59
XX	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	523.384.000,00	458.310.542,00	87,57
1	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan	30.080.000,00	28.240.587,00	93,88
2	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup	366.521.000,00	357.300.012,00	97,48
3	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	126.783.000,00	72.769.943,00	57,4

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 3 Program dan 20 Kegiatan dan 59 sub kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar **Rp.160.688.173.184,-** terealisasi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp.131.448.103.272,-** atau sebesar **81,8 %**.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Mei Tahun 2025

Rencana yang tercantum dalam dokumen induk Renja Tahun 2025 telah dilaksanakan selama lima bulan, yaitu dari Januari hingga Mei 2025. Evaluasi atas pelaksanaan ini dilakukan untuk menilai apakah capaian pada lima bulan pertama masih menyisakan target yang realistis untuk dicapai pada semester berikutnya. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menyesuaikan program dengan prioritas kepala daerah terpilih. Pelaksanaan tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Renja agar lebih sesuai dengan kondisi aktual. Data realisasi fisik dan anggaran sampai dengan bulan Mei 2025 diperoleh dari laporan realisasi anggaran, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pelaksanaan Program / Kegiatan Tahun 2025 (Januari s/d Mei)

NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	DANA	KEMAJUAN / REALISASI BULAN JUNI		
	ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK	PENYERAPAN KEUANGAN	
		(%)	(Rp)	(%)
2	3	10	11	12
Sekretariat Daerah	109.282.577.775,49	39,28	36.895.431.787,00	33,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	92.463.338.565,49	38,72	32.998.214.579,00	35,69

DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	136.559.006,91	43,6	58.898.209,00	43,13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.685.312,41	50	34.020.000,00	55,15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.957.694,50	42	19.464.000,00	37,46
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	22.916.000,00	30	5.414.209,00	23,63
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.990.881.075,00	45	11.746.932.233,00	41,97
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.990.881.075,00	45	11.746.932.233,00	41,97
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	653.975.492,00	1,94	10.010.000,00	1,53
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	590.541.992,00	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.433.500,00	20	10.010.000,00	15,78
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	900.338.101,00	25,86	140.258.797,00	15,58
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	157.420.000,00	35	45.285.000,00	28,77
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	49.970.000,00	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.781.220.714,00	49,66	7.097.925.423,00	48,02



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.774.633.480,00	48,95	2.343.456.488,00	49,08
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.006.587.234,00	50	4.754.468.935,00	47,51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.082.094.250,00	20	392.280.000,00	18,84
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.363.468.640,00	49,47	699.118.024,00	51,27
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	357.788.640,00	4,17	56.618.024,00	15,82
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100
Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	7.229.791.948,00	29,84	1.813.784.470,00	25,09
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.500.000.000,00	35	412.058.789,00	27,47
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	305.748.000,00	42,98	91.970.000,00	30,08
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	599.058.792,50	40	87.049.001,00	14,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	182.794.360,00	85	144.593.686,00	79,1
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.875.291.911,69	37,06	1.806.829.510,00	37,06
Fasilitasi Keprotokolan	2.352.420.000,00	15,65	368.100.000,00	15,65
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.300.693.706,00	62,16	1.430.201.410,00	62,16

Pendokumentasian Tugas Pimpinan	222.178.205,69	3,84	8.528.100,00	3,84
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.848.415.235,00	43,02	3.675.152.334,00	24,75
Administrasi Tata Pemerintahan	1.619.399.727,00	9,41	114.802.267,00	7,09
Penataan Administrasi Pemerintahan	1.329.523.580,00	8	73.444.213,00	5,52
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	148.229.351,00	11	14.568.254,00	9,83
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.206.927.630,00	50	2.920.275.785,00	28,61
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	146.433.745,00	0	0	0
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.668.328.566,00	41,01	281.158.654,00	16,85
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	846.127.567,00	36,24	245.708.428,00	29,04
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	149.012.607,00	30	33.073.900,00	22,2
Fasilitasi Bantuan Hukum	619.901.977,50	40,39	212.634.528,00	34,3
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	77.212.982,50	15	0	0
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	361.198.000,00	38,89	113.207.200,00	31,34
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	142.136.000,00	50	63.207.200,00	44,47
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	198.320.000,00	35	50.000.000,00	25,21
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	20.742.000,00	0	0	0



PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.970.823.975,00	37,24	222.064.874,00	11,27
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	316.669.000,00	62,72	97.855.200,00	30,9
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.786.000,00	63	36.358.734,00	29,85
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	95.759.000,00	60	27.700.052,00	28,93
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	99.124.000,00	65	33.796.414,00	34,1
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	541.729.000,00	35	31.379.744,00	5,79
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	313.120.000,00	35	26.493.544,00	8,46
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	148.244.000,00	35	0	0
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	80.365.000,00	35	4.886.200,00	6,08
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	631.009.975,00	42,79	23.135.422,00	3,67
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	315.071.475,00	55,56	17.968.861,00	5,7
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	189.864.500,00	50	5.166.561,00	2,72
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	126.074.000,00	0	0	0
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	481.416.000,00	15,73	69.694.508,00	14,48
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	15.571.000,00	0	0	0

Kelautan, dan Perikanan				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	388.048.000,00	7,07	23.031.000,00	5,94
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	77.797.000,00	62,08	46.663.508,00	59,98

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai 3 Program, 20 Kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 109.282.577.775,-** terealisasi per 31 Mei 2025 sebesar **Rp. 36.895.431.787,-** atau sebesar **33,76 %**.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan data realisasi kegiatan tahun anggaran 2024, terdapat sejumlah kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil yang telah direncanakan, khususnya yang memiliki realisasi fisik di bawah 80 persen. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan, baik dari aspek perencanaan, kebijakan pimpinan, hingga faktor teknis dan administratif.

Sebagai contoh, kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya terealisasi sebesar 79,22 persen karena pembayaran TPP ke-13 dan TPP bulan Desember belum dilakukan dan direncanakan akan dibayarkan pada tahun 2025. Hal serupa juga terjadi pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, yang realisasinya hanya mencapai 43,85 persen karena belum dibayarkannya TPP ke-13 dan TPP bulan Desember.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah hanya terealisasi sebesar 94 persen secara keuangan, namun secara fisik mengalami hambatan teknis tertentu. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi 76,01 persen karena efisiensi anggaran. Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan hanya mencapai 42,1 persen, disebabkan oleh perubahan DPA yang terjadi setelah tahapan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tidak dapat dijalankan. Selain itu, terdapat arahan dari Bupati untuk meniadakan kegiatan seremonial.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan memiliki realisasi sebesar 60,7 persen, yang dipengaruhi oleh minimnya pengaduan dari masyarakat terkait konflik batas wilayah serta koordinasi dan konsultasi teknis kelurahan terhadap ukuran dan bahan material patok batas yang dibutuhkan. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah hanya mencapai 64,28 persen karena jumlah desa atau kelurahan yang dilibatkan lebih sedikit dari rencana awal dan adanya kendala dalam proses administrasi pelaksanaan kegiatan. Proses pengadaan honorarium yang tidak optimal serta keterbatasan waktu menjelang akhir tahun juga turut menjadi faktor penghambat.

Selanjutnya, kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual hanya mencapai 69,91 persen akibat dibatalkannya kegiatan umroh. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait

Kesejahteraan Sosial tidak terlaksana sama sekali dengan realisasi nol persen karena efisiensi anggaran. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat hanya mencapai 72,61 persen karena berbagai kendala teknis dan administratif. Beberapa di antaranya termasuk pelaksanaan Safari Ramadan yang hanya dilakukan di tujuh kecamatan dari lima belas yang direncanakan, tertundanya pembayaran honorarium, serta pembatalan kegiatan umroh yang berdampak pada serapan anggaran.

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum hanya mencapai realisasi 58,9 persen karena tidak terserapnya anggaran perkara di pengadilan akibat belum masuknya perkara sesuai rencana. Selain itu, terdapat dua permohonan bantuan hukum yang dicabut oleh pemohon, satu permohonan yang tidak memenuhi persyaratan administratif, dan belum terpenuhinya persyaratan teknis terkait dengan jumlah perkara aktual. Hambatan administratif tersebut turut memengaruhi tingkat serapan anggaran secara keseluruhan.

Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri mencatatkan realisasi 48,78 persen karena efisiensi anggaran menyebabkan hanya sebagian paket kerja sama yang dijalankan. Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan hanya mencapai 38,25 persen karena kegiatan evaluasi dan monitoring tidak berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa hanya mencapai 38,59 persen karena kegiatan pengadaan

barang dan jasa mengalami kendala dalam prosesnya, yang menyebabkan penundaan pelaksanaan.

Selain itu, kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum hanya mencapai 38,31 persen. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mencapai 47,41 persen karena dilaksanakan secara efisien sehingga tidak seluruh program berjalan. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah juga belum mencapai target karena pelaksanaannya tidak sepenuhnya optimal akibat perubahan alokasi dan prioritas anggaran.

Secara keseluruhan, capaian realisasi fisik yang rendah ini menunjukkan bahwa banyak kegiatan menghadapi kendala struktural, administratif, dan kebijakan, yang secara langsung mempengaruhi capaian kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Di sisi lain, terdapat pula kegiatan yang menunjukkan capaian kinerja sesuai dengan target yang direncanakan. Beberapa kegiatan memiliki tingkat realisasi mendekati 100%, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan. Contohnya adalah kegiatan *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* yang mencapai 99,94%, di mana pelaksanaan disesuaikan dengan tagihan per bulan, sehingga anggaran terserap dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Penyusunan Produk Hukum Daerah juga mencatatkan capaian di atas 90%, menandakan bahwa kegiatan tersebut memiliki proses dan jadwal pelaksanaan yang sudah terstruktur dengan baik. Capaian ini menjadi indikator bahwa dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, program-program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program/kegiatan yang tercantum, tidak ditemukan adanya kegiatan yang melebihi target kinerja (di atas 100%). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target kinerja secara umum telah disusun secara realistis dan sesuai dengan kapasitas pelaksanaan yang ada. Namun demikian, tidak adanya capaian yang melebihi target juga bisa menjadi catatan bahwa ruang untuk inovasi atau pengembangan kegiatan secara progresif masih terbatas, dan perlu adanya strategi khusus agar kegiatan tidak hanya tercapai sesuai target, tetapi dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan.

4. Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja program/kegiatan sangat beragam, baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga beberapa kegiatan dibatalkan atau dikurangi lingkupnya. Selain itu, perubahan DPA yang terjadi di tengah

tahun tanpa diikuti dengan penyesuaian jadwal kegiatan menyebabkan beberapa program tidak sempat dilaksanakan. Faktor lain yang signifikan adalah hambatan administratif, seperti keterlambatan proses hukum pada kegiatan bantuan hukum dan pengadaan barang yang terkendala prosedur. Beberapa kegiatan juga tidak berjalan karena rendahnya kebutuhan aktual atau permintaan dari masyarakat, seperti minimnya permohonan bantuan hukum atau jumlah desa yang ikut serta dalam program lebih sedikit dari perencanaan awal. Secara keseluruhan, faktor perencanaan, fleksibilitas pelaksanaan, dan koordinasi lintas unit menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja.

5. Implikasi terhadap target capaian program dalam Renstra SKPD

Implikasi dari capaian kinerja program terhadap target dalam dokumen Renstra SKPD cukup signifikan. Kegiatan yang tidak mencapai target berpotensi menurunkan tingkat efektivitas pelaksanaan visi dan misi strategis perangkat daerah. Target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra menjadi sulit dicapai apabila kegiatan prioritas mengalami keterlambatan atau pembatalan. Namun demikian, kegiatan-kegiatan yang berhasil mencapai atau mendekati target dapat menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi program dan menjadi sumber motivasi bagi unit pelaksana untuk mempertahankan dan meningkatkan performa di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menuntut adanya refleksi kritis terhadap penyebab kegagalan sekaligus apresiasi atas pencapaian

yang sudah diraih, agar proses penyusunan dan pelaksanaan Renstra di masa depan lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi penyebab tersebut

Untuk mengatasi rendahnya capaian kinerja, diperlukan sejumlah kebijakan dan tindakan strategis dalam perencanaan dan penganggaran. Pertama, proses perencanaan perlu disusun lebih fleksibel dengan mengantisipasi perubahan kebijakan, baik dari internal organisasi maupun dari pimpinan daerah. Kedua, penyusunan DPA dan alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan dan jadwal kegiatan agar tidak terjadi pembatalan. Ketiga, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan menjadi kunci utama dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai jadwal. Keempat, prosedur administratif, terutama pada kegiatan bantuan hukum dan pengadaan barang, perlu disederhanakan agar tidak menjadi hambatan realisasi. Terakhir, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala dengan pendekatan yang lebih solutif, agar permasalahan yang muncul di tengah jalan dapat segera diatasi sebelum mempengaruhi kinerja keseluruhan.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati selaku Kepala Daerah. Sekretaris Daerah memiliki tugas utama membantu Bupati dalam perumusan kebijakan dan

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta penyelenggaraan pelayanan administratif secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Daerah dibantu oleh tiga orang Asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), yang menangani urusan pemerintahan umum, hukum, politik, dan kesejahteraan rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), yang mengoordinasikan urusan ekonomi, pembangunan, dan sumber daya alam;
3. Asisten Administrasi Umum (Asisten III), yang membidangi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, aset, serta tata usaha pemerintahan.

Sekretariat Daerah juga berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Staf Ahli, Bagian-Bagian, serta memfasilitasi Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Kelurahan. Fungsi ini mencakup pengendalian administrasi pemerintahan, fasilitasi pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah.

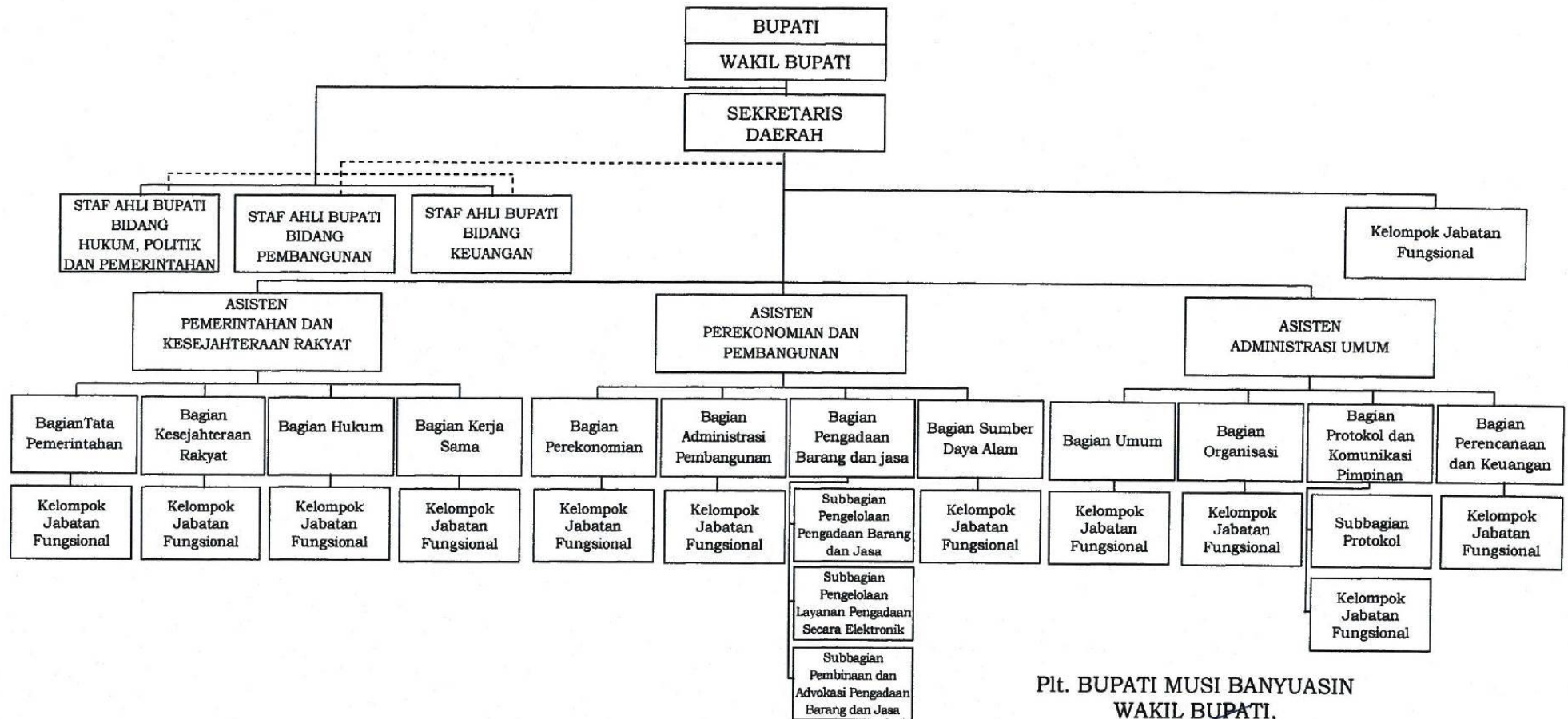
Capaian kinerja Sekretariat Daerah diukur melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pengelolaan keuangan serta aset daerah. Struktur organisasi dan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam lampiran sebagai bahan evaluasi dan analisis capaian tahun berjalan.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin terlampir di bawah ini.



STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

BENI HERNEDI



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

No	Kinerja Utama (Tujuan / Sasaran Strategis)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Keterangan
1.	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Angka	3	-	Nilai LPPD Tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan LPPD Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan.
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten	Predikat	BB	B (69,07)	
		3. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	N/A	Nilai belum rilis dari Kemenpan RB
		4. Persentase PD yang tepat Fungsi	%	100	100	
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92	88,84	
		6. Persentase Produk Hukum dan Informasi Daerah yang berkualitas	%	100	102,022	
		7. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Skor	80,28	76,64	- Perencanaan OPD tidak sesuai dengan realisasi - OPD tidak menginput data di Aplikasi SPSE secara lengkap

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2024 menunjukkan dinamika yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan. Berdasarkan sasaran strategis peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya memenuhi target. Salah satunya adalah nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang hingga saat ini belum tersedia. Hal ini disebabkan LPPD Tahun 2023 belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara LPPD Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan, sehingga pencapaian target indikator ini belum dapat diukur secara pasti.

Selanjutnya, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Musi Banyuasin terealisasi sebesar B (69,07), yang masih berada di bawah target BB. Hasil ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam pelaksanaan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berbasis hasil. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi belum memiliki data realisasi karena nilai resmi dari Kementerian PANRB masih dalam proses rilis. Indikator ini penting untuk mengukur keberhasilan upaya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang akuntabel.

Pada sisi lain, terdapat indikator yang berhasil memenuhi target, yaitu persentase perangkat daerah yang tepat fungsi sebesar 100%, sesuai target yang ditetapkan. Ini mencerminkan bahwa seluruh perangkat daerah telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan regulasi dan struktur organisasi yang berlaku. Namun demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat



(IKM) masih menunjukkan hasil di bawah target, yaitu 88,84 dari target 92. Hal ini menandakan bahwa masih diperlukan peningkatan kualitas layanan publik, terutama pada aspek kecepatan, kemudahan, dan kejelasan prosedur pelayanan.

Dalam sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik, indikator persentase produk hukum dan informasi daerah yang berkualitas mencatat realisasi sebesar 102,02%, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dokumen hukum dan informasi publik telah berjalan baik. Akan tetapi, Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) hanya terealisasi sebesar 76,64 dari target 80,28. Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian ini, seperti ketidaksesuaian perencanaan kegiatan dengan realisasi pelaksanaan oleh OPD, serta belum optimalnya input data pengadaan pada sistem SPSE.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian positif, masih banyak aspek yang memerlukan penguatan dan perbaikan, khususnya dalam hal penguatan akuntabilitas, digitalisasi pengadaan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Ke depan, diperlukan upaya strategis yang lebih terarah melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas ASN, serta penyesuaian kebijakan berbasis data untuk mendukung pencapaian target kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan.

2.4 Isu-Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Terutama dalam Mendukung Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

sebagai koordinator administratif pemerintahan memiliki peran penting dalam menjamin keterpaduan, efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu diperhatikan secara serius sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance).

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tuntutan Akuntabilitas

Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut reformasi birokrasi yang serius, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang akuntabel, efektif, efisien, dan transparan. Kinerja pelayanan administrasi, keprotokolan, serta dukungan teknis kepada kepala daerah perlu terus ditingkatkan agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

2. Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme ASN

Permasalahan terkait rendahnya kompetensi dan disiplin aparatur, belum optimalnya manajemen SDM, serta lemahnya budaya kerja kolaboratif menjadi isu strategis yang harus ditangani. Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan merit system sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan berorientasi pada hasil.

3. Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Struktur organisasi, mekanisme kerja, serta proses bisnis antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah masih memerlukan pembenahan. Penataan ketatalaksanaan, penyusunan SOP, serta reformasi

kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat koordinasi lintas bidang, mempercepat pengambilan keputusan, dan menghindari tumpang tindih tugas.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital

Masih terbatasnya sistem pengelolaan data elektronik, basis data daerah, serta pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan aset, keuangan, dan perencanaan menjadi hambatan dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Transformasi digital menjadi agenda strategis untuk mempercepat proses layanan, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik.

5. Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Efisien dan Transparan

Permasalahan terkait ketidaktertiban administrasi pengelolaan keuangan, belum optimalnya pelaporan keuangan tepat waktu, serta belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah menjadi tantangan besar. Sekretariat Daerah harus mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

6. Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah

Masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah maupun antar wilayah dalam urusan strategis seperti penyelesaian batas wilayah, fasilitasi BUMD, penataan hukum daerah, serta pelaksanaan program pembangunan lintas sektor, menjadi hambatan dalam pencapaian program prioritas. Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, baik secara vertikal maupun horizontal.

7. Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah

Kebutuhan akan produk hukum yang adaptif terhadap dinamika daerah dan sesuai dengan regulasi nasional masih menjadi perhatian. Belum optimalnya pepaduan produk hukum, minimnya basis data peraturan daerah, serta perlunya peningkatan koordinasi antar bagian hukum dan perangkat daerah lainnya menjadi isu yang harus ditindaklanjuti.

8. Disiplin, Komitmen, dan Etos Kerja Aparatur

Disiplin aparatur dan komitmen dalam menjalankan tugas masih belum optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan jadwal pelaksanaan program berdampak pada keterlambatan kinerja dan menurunnya kualitas layanan publik. Peningkatan budaya kerja dan internalisasi nilai-nilai ASN harus terus dikuatkan.

9. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menyentuh seluruh aspek kelembagaan secara menyeluruh. Upaya reformasi di bidang kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik masih belum terintegrasi secara optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih mendalam agar birokrasi lebih adaptif dan inovatif.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Perubahan Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah

- b. Program prioritas pembangunan daerah
- c. Rencana Kerja, pendanaan dan prakiran maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Sekretariat Daerah yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Penjelasan mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Musi Banyuasin

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN TAHUN 2025						PENETAPAN PERUBAHAN TAHUN 2025					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	SEKRETARIAT DAERAH				134.495.932.469,00		SEKRETARIAT DAERAH				134.495.932.469,00
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				134.495.932.469,00		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				134.495.932.469,00
	SEKRETARIAT DAERAH				134.495.932.469,00		SEKRETARIAT DAERAH				134.495.932.469,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	100 134 16 3 420 80 85 8 B % Laporan Laporan Laporan Unit % % Dokumen Predikat	117.031.132.259,00	1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah dalam Kab. Muba Persentase terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tepat dan cepat Terbentuknya inovasi pelayanan publik perangkat daerah dan tersertifikasinya pelayanan publik perangkat daerah dengan standar ISO Meningkatnya Jumlah sarana dan prasarana fasilitas kerja (Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya jumlah aset tetap/aset tak berwujud milik daerah Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten dan Indeks Reformasi Birokrasi	100 134 16 3 420 80 85 8 B % Laporan Laporan Laporan Unit % % Dokumen Predikat	117.031.132.259,00



	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen	71.478.894,50		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen	71.478.894,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	36.844.894,50			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	36.844.894,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	29.070.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	29.070.000,00
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	1 Data	5.564.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak baru	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	1 Data	5.564.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhiya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	1 Laporan 1 Tahun 200 Dokumen 4 Laporan	39.464.261.429,35		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terpenuhiya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</i>	1 Laporan 1 Tahun 200 Dokumen 4 Laporan	39.464.261.429,35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	200 Orang/ bulan	39.464.261.429,35			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	200 Orang/ bulan	39.464.261.429,35



	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	632.361.992,00		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	632.361.992,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen	581.113.992,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2 Dokumen	581.113.992,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	51.248.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1 Laporan	51.248.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya</i>	100 % 12 Paket 143 Orang 2 Dokumen 300 Orang	904.212.601,00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya</i>	100 % 12 Paket 143 Orang 2 Dokumen 300 Orang	904.212.601,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	12 Paket	191.170.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	12 Paket	191.170.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	41.927.500,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	41.927.500,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	143 Orang	570.622.000,00			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	143 Orang	570.622.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	100.493.101,00			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80 Orang	100.493.101,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhi kebutuhan bahan logistik kantor Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya souvenir, cindra mata, pakan ternak dan sewa peralatan	100 % 10 Paket 11 Paket 12 Bulan 1 Paket 20 Laporan 26 Paket 4 Paket	18.426.556.136,46		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terpenuhi kebutuhan bahan logistik kantor Terpenuhi Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya souvenir, cindra mata, pakan ternak dan sewa peralatan	100 % 10 Paket 11 Paket 12 Bulan 1 Paket 20 Laporan 26 Paket 4 Paket	18.426.556.136,46



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	449.888.373,00		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	449.888.373,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68 0	3.299.611.371,78		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	68 0	3.299.611.371,78
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.464.194.245,00		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.464.194.245,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	795.926.743,90		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	795.926.743,90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	800.393.342,78		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	800.393.342,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	189.043.800,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dokumen	189.043.800,00
	Penyediaan Bahan/Material						Penyediaan Bahan/Material				
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	40.680.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	1 Paket	40.680.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Fasilitasi Kunjungan Tamu				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	7.597.867.505,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	12 Laporan	7.597.867.505,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	3.788.950.755,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	3.788.950.755,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	7.661.172.561,50		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	7.661.172.561,50
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	4 Unit	6.940.389.880,00			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	4 Unit	6.940.389.880,00
	Pengadaan Mebel						Pengadaan Mebel				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	720.782.681,50			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	720.782.681,50
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	18.929.176.208,00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	-	18.929.176.208,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6.357.739.808,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	6.357.739.808,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12.571.436.400,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12.571.436.400,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor</i>	117 Unit 2 Paket 561 unit	12.574.310.760,00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor</i>	117 Unit 2 Paket 561 unit	12.574.310.760,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	117 Unit	5.833.214.900,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	117 Unit	5.833.214.900,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	4.822.905.860,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	4.822.905.860,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	561 Unit	1.918.190.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	561 Unit	1.918.190.000,00
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		<i>Terlaksananya Medical Check Up KDH/WKDH Terpuhinya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi KDH/WKDH</i>	12 Bulan 2 orang 2 paket	1.916.868.640,00		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		<i>Terlaksananya Medical Check Up KDH/WKDH Terpuhinya pembayaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH Tersedianya Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya bagi KDH/WKDH</i>	12 Bulan 2 orang 2 paket	1.916.868.640,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan	357.788.640,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan	357.788.640,00
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	751.480.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	751.480.000,00
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang	8.600.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang	8.600.000,00
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan	799.000.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	2 Orang/Bulan	799.000.000,00
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		-	-	8.835.541.948,00		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		-	-	8.835.541.948,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	5.111.817.948,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	5.111.817.948,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	2.205.750.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	2.205.750.000,00
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	1.517.974.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</i>	1 Paket	1.517.974.000,00



	Penataan Organisasi		<i>Tercapainya Indeks persepsi Reformasi dan Birokrasi se Kabupaten Muba Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Keselarasan Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen LKjIP, dan fasilitasi pelaksanaan SAKIP) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Terlaksananya seleksi evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya LKPJ Bupati Muba TA. 2024, LPPD dan RLPPD Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Muba Tahun 2024</i>	15 Kecamatan 2 Dokumen 3 Laporan 48 Perangkat Daerah 4 Dokumen 60 Perangkat Daerah BB Predikat	1.535.905.702,50		Penataan Organisasi		<i>Tercapainya Indeks persepsi Reformasi dan Birokrasi se Kabupaten Muba Tercapainya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Keselarasan Dokumen IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen LKjIP, dan fasilitasi pelaksanaan SAKIP) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Terlaksananya seleksi evaluasi kinerja kecamatan (3 kecamatan terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya LKPJ Bupati Muba TA. 2024, LPPD dan RLPPD Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab. Muba Tahun 2024</i>	15 Kecamatan 2 Dokumen 3 Laporan 48 Perangkat Daerah 4 Dokumen 60 Perangkat Daerah BB Predikat	1.535.905.702,50
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	2 Dokumen	450.704.550,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</i>	2 Dokumen	450.704.550,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	5 Laporan	305.748.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	5 Laporan	305.748.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	3 Dokumen	602.058.792,50			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	3 Dokumen	602.058.792,50
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	4 0	177.394.360,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	4 0	177.394.360,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		<i>Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya kegiatan acara KDH/WKDH Terpenuhiya kebutuhan fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhiya penerimaan kunker pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah Tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati</i>	100 % 108 kali 12 Bulan 2 Dokumen 2 Laporan	6.079.285.385,69		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		<i>Persentase kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah yang terfasilitasi Terdokumentasinya kegiatan peringatan hari besar Terlaksananya kegiatan acara KDH/WKDH Terpenuhiya kebutuhan fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhiya penerimaan kunker pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah Tersusunnya laporan harian dan laporan triwulan bupati</i>	100 % 108 kali 12 Bulan 2 Dokumen 2 Laporan	6.079.285.385,69
	Fasilitasi Keprotokolan						Fasilitasi Keprotokolan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>	2 Laporan	2.460.420.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>	2 Laporan	2.460.420.000,00
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	12 Laporan	3.398.642.180,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	12 Laporan	3.398.642.180,00
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						Pendokumentasian Tugas Pimpinan				



		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	4 Laporan	220.223.205,69			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</i>	4 Laporan	220.223.205,69
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9 Dokumen	15.455.488.235,00	2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten	9 Dokumen	15.455.488.235,00
	Administrasi Tata Pemerintahan		-	-	1.526.472.727,00		Administrasi Tata Pemerintahan		-	-	1.526.472.727,00
	Penataan Administrasi Pemerintahan						Penataan Administrasi Pemerintahan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	5 Dokumen	1.241.808.580,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	5 Dokumen	1.241.808.580,00
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	10 Dokumen	148.230.351,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	10 Dokumen	148.230.351,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	3 Dokumen	136.433.796,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	3 Dokumen	136.433.796,00



	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten Terbinanya mental keagamaan warga kab.muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ Terlaksananya Pembinaan UKS Terlaksananya STQH tingkat kabupaten Terlaksananya STQH tingkat Provinsi Terlaksananya TC Peserta STQH Tingkat Provinsi Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah haji kab. Musi banyuasin Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah Umroh kab. Musi Banyuasin	100 orang 15 kecamatan 200 Pasang 20 orang 300 orang 40 orang 500 orang 50 orang 845 Orang 9 hari besar keagamaan	12.721.689.941,00		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah pasangan Isbat Nikah warga Kab. Musi banyuasin yang kurang mampu Persentase fasilitasi kegiatan yang mendukung program pembangunan dan kesra tingkat kecamatan dan kabupaten Terbinanya mental keagamaan warga kab.muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya kegiatan peringatan hari-hari besar Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta MTQ Terlaksananya Pembinaan UKS Terlaksananya STQH tingkat kabupaten Terlaksananya STQH tingkat Provinsi Terlaksananya TC Peserta STQH Tingkat Provinsi Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah haji kab. Musi banyuasin Terselenggaranya fasilitas pemberangkatan jamaah Umroh kab. Musi Banyuasin	100 orang 15 kecamatan 200 Pasang 20 orang 300 orang 40 orang 500 orang 50 orang 845 Orang 9 hari besar keagamaan	12.721.689.941,00
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	11.206.927.630,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	11.206.927.630,00
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	146.433.745,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	146.433.745,00



Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>	2 Dokumen	1.368.328.566,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i>	2 Dokumen	1.368.328.566,00
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		<i>Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat umum Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di LP Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Terlaksananya Sosialisasi RANHAM Kab. Muba Terselesainya sengketa hukum Masyarakat Miskin Terselesainya Sengketa Hukum (Perdata, TUN, Legal Opinion)</i>	100 orang 1400 orang 154 kasus 2 kecamatan 34 kasus 40 orang 742 peraturan	846.127.567,00		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		<i>Terbentuknya peraturan daerah yang berkualitas Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat umum Terlaksananya Penyuluhan Hukum bagi Narapidana di LP Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-UU-an Terlaksananya Sosialisasi RANHAM Kab. Muba Terselesainya sengketa hukum Masyarakat Miskin Terselesainya Sengketa Hukum (Perdata, TUN, Legal Opinion)</i>	100 orang 1400 orang 154 kasus 2 kecamatan 34 kasus 40 orang 742 peraturan	846.127.567,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>	742 Dokumen	149.012.607,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>	742 Dokumen	149.012.607,00
Fasilitasi Bantuan Hukum						Fasilitasi Bantuan Hukum					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	210 Kasus	619.901.977,50			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	210 Kasus	619.901.977,50
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					

		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	5 Dokumen	77.212.982,50			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>	5 Dokumen	77.212.982,50
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah		<i>Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Luar Negeri dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Keanggotaan UCLG ASPAC Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri</i>	1 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen	361.198.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Daerah		<i>Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, meliputi Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Luar Negeri dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Keanggotaan UCLG ASPAC Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri</i>	1 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen	361.198.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	5 Dokumen	142.136.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>	5 Dokumen	142.136.000,00
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>	1 Dokumen	198.320.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>	1 Dokumen	198.320.000,00
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>	6 Laporan	20.742.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama</i>	6 Laporan	20.742.000,00



3,	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	18 8 Laporan Dokumen	2.009.311.975,00	3,	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah pemetaan potensi sumber daya alam	18 8 Laporan Dokumen	2.009.311.975,00
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		<i>Terlaksananya Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD dan BLUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD Terlaksananya Pembinaan BUMD Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi</i>	14 Kecamatan 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Laporan 32 BLUD 3 BUMD 4 Laporan	316.669.000,00		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		<i>Terlaksananya Analisa Perkembangan dan Pencapaian Kinerja BUMD dan BLUD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD Terlaksananya Pembinaan BLUD Terlaksananya Pembinaan BUMD Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi</i>	14 Kecamatan 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Laporan 32 BLUD 3 BUMD 4 Laporan	316.669.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	41 Dokumen	121.786.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	41 Dokumen	121.786.000,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	18 Laporan	95.759.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	18 Laporan	95.759.000,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	15 Dokumen	99.124.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	15 Dokumen	99.124.000,00



	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		<i>Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pemeriksaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan dan Upah, Harga Barang, ASB Konstruksi, ASB Perhitungan, ASB Permodelan dan TAPD Tersusunnya Laporan Fasilitas Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN)</i>	15 Laporan 3 Laporan 4 Laporan	472.647.000,00		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		<i>Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pemeriksaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan dan Upah, Harga Barang, ASB Konstruksi, ASB Perhitungan, ASB Permodelan dan TAPD Tersusunnya Laporan Fasilitas Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (SHSTBGN)</i>	15 Laporan 3 Laporan 4 Laporan	472.647.000,00
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>	4 Dokumen	254.842.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>	4 Dokumen	254.842.000,00
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	3 Laporan	148.244.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>	3 Laporan	148.244.000,00
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	15 Laporan	69.561.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	15 Laporan	69.561.000,00

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		<i>Telaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa Telaksananya bantuan hukum pengadaan barang dan jasa Telaksananya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Telaksananya proses pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa lainnya pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Telaksananya proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Telaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin</i>	1 Kasus 1 Pelayanan 23 orang 30 Paket 40 Paket 435 Paket	589.159.975,00		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		<i>Telaksananya pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa Telaksananya bantuan hukum pengadaan barang dan jasa Telaksananya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE Telaksananya proses pemilihan penyedia jasa konsultasi dan jasa lainnya pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Telaksananya proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin Telaksananya proses pemilihan penyedia pengadaan barang pada seluruh OPD dalam Kab. Musi Banyuasin</i>	1 Kasus 1 Pelayanan 23 orang 30 Paket 40 Paket 435 Paket	589.159.975,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	505 Dokumen	302.621.475,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i>	505 Dokumen	302.621.475,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	1 Dokumen	189.864.500,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	1 Dokumen	189.864.500,00
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				
	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	23 Orang	96.674.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i>	23 Orang	96.674.000,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	-	630.836.000,00		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		-	-	630.836.000,00



Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>	5 Dokumen	15.571.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</i>	5 Dokumen	15.571.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>	5 Dokumen	388.048.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</i>	5 Dokumen	388.048.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					
		Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>	5 Dokumen	227.217.000,00			Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</i>	5 Dokumen	227.217.000,00
J U M L A H					134.495.932.469	J U M L A H					134.495.932.469



2.6 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat

Mekanisme perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Dalam forum ini, masyarakat mengusulkan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan prioritas sesuai kondisi lokal.

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat selanjutnya dianalisis berdasarkan kesesuaian dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan. Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai unsur pendukung koordinasi administratif kepala daerah, berperan dalam menyelaraskan usulan-usulan tersebut dengan arah kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah lainnya.

Hasil penelaahan dan inventarisasi program atau kegiatan yang telah diselaraskan kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui forum lintas perangkat daerah bersama pemangku kepentingan. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Adapun usulan program

dan kegiatan dari masyarakat yang telah dikompilasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ditampilkan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin	Bantuan Tenda dan Kursi untuk Karang Taruna Garuda Muda Desa Banjar Jaya Kecamatan Tungkal Jaya	1 Paket
2		Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	Hibah Kursi dan Tenda Kelompok Pengajian "Al - Hikmah" Dusun2 Desa Bayat Ilir Kecamatan Bayung Lencir	1 Paket
3		Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	Hibah Kursi dan Tenda Kelompok Pengajian "AL-Hidayah" Dusun 2 Rimba Antui Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir	1 Paket
4		Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	Hibah Kursi dan Tenda Pengajian 'Al Muhlisin' Dusun 2 Rimba Antui Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir	1 Paket
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Tungkal Jaya, Kab. Musi Banyuasin	Belanja Hibah Mobil Ambulance Desa Bero Jaya Timur Kec. Tungkal Jaya	1 Unit
6		Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin	Belanja Hibah Mobil Ambulance Desa Muara Merang Kec. Bayung Lencir	1 Unit
7		Kecamatan Lais, Kab. Musi Banyuasin	Belanja Mobil Siaga Desa Teluk Kijing III Kec. Lais	1 Unit
8	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Belanja Kontribusi Asosiasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	198 Orang

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2025 juga disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 diarahkan pada slogan ***“Memperkuat Struktur Ekonomi Daerah untuk Akselerasi Pertumbuhan ekonomi dan Penurunan Kemiskinan”***. Adapun kegiatan dalam renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3. 1

Persandingan antara Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Nasional	Provinsi	Kabupaten Musi Banyuasin
• Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	• Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	• Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
• Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	• Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	• Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem

• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	• Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan	• Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar
• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	• Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	• Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
• Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
• Membangun lingkungan hidup, bencana dan perubahan iklim		• Transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
• Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban yang telah ditetapkan secara periodik dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran di atas dijabarkan dalam perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis Kabupaten Musi Banyuasin yang hendak dicapai selama periode 3 (tiga) tahun sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

b. Sasaran :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pernyataan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Indikator	Target (Tahun)			
			2023	2024	2025	2026
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	C	CC	CC	B

Tabel 4.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	BB	BB	BB	BB
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	92	92	92

Berdasarkan tujuan di atas, disusunlah sasaran Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin dengan merumuskan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan bisa tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan sosial masyarakat;
2. Pengembangan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha;
3. Peningkatan produktifitas dan sportifitas generasi muda;
4. Memantapkan pemahaman bahaya narkoba;
5. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
6. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;

7. Melanjutkan arah kebijakan tahun 2024.

Arah kebijakan merupakan komponen atau bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut bidang/ sub bidang, sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama lima tahun. Arah kebijakan pembangunan dapat dijalankan dalam satu tahun periode, namun dapat juga membutuhkan lebih dari satu tahun. Hal yang terpenting adalah arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang terpadu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada.

Agar penetapan arah kebijakan terarah dan fokus maka dilakukan pemetaan waktu arah kebijakan pembangunan. Dengan adanya pemetaan waktu pencapaian arah kebijakan dapat terlihat kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Dari hasil analisis strategi dalam mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin lima tahun ke depan. Renja Sekretariat Daerah sebagai salah dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Unsur pendukung ini sangat penting dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah karena berperan dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dan memiliki tugas strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dari seluruh perangkat daerah serta memastikan sinergi antar bagian dalam mencapai target pembangunan.

Penyusunan dan perumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi keuangan daerah yang mempengaruhi kapasitas pembiayaan program dan kegiatan;
2. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah;
3. Penyesuaian terhadap regulasi yang terbit setelah ditetapkan RPKD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025, termasuk kebutuhan penambahan atau pengurangan program dan/atau kegiatan.



Secara keseluruhan, berikut adalah rekapitulasi perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

- Jumlah program: 3 program
- Jumlah kegiatan: 20 kegiatan
- Jumlah subkegiatan: 64 subkegiatan
- Total pagu anggaran: Rp134.495.932.469

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 sepenuhnya diarahkan untuk mendukung efektivitas koordinasi pemerintahan dan pelayanan administratif yang berkualitas serta adaptif terhadap dinamika kebutuhan daerah.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025 tercantum pada Tabel III.1 berikut ini.

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra Opd	Realisasi Capaian Renja Opd Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja Opd Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	Lokasi	Sumb er Dana	Prioritas			Target	Pagu indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	Rkpd 2025	Apbd 2025	Rkpd Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Sekretariat Daerah							122.387.070.714	120.811.591.060	134.495.932.469	12.108.861.755							157.118.611.813,00	
	4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							122.387.070.714	120.811.591.060	134.495.932.469	12.108.861.755							157.118.611.813,00	
	4.01	Sekretariat Daerah							122.387.070.714	120.811.591.060	134.495.932.469	12.108.861.755							157.118.611.813,00	
1 ,	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersusunnya Analisa Jabatan Perangkat Daerah Dalam Kab. Muba Persentase Terlayannya Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Yang Tepat Dan Cepat Terbentuknya Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah Dan Tersertifikasinya Pelayanan Publik Perangkat Daerah Dengan Standar Iso Meningkatnya Jumlah Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kerja (Gedung Kantor Dan Kendaraan Dinas) Terpeliharanya Jumlah Aset Tetap/Aset Tak Berwujud Milik Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepada Daerah Dan Sekretaris Daerah Jumlah Dokumen Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kabupaten Dan Indeks Reformasi Birokrasi				100 134 16 3 420 80 85 8 8 % Laporan Laporan Laporan Unit % % Dokumen Predikat	100 134 16 3 420 80 85 8 8 % Laporan Laporan Laporan Unit % % Dokumen Predikat	104.113.841.091	96.212.648.437	117.031.132.259	27.799.770.722							131.913.611.813,00	



4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran Induk/Perubahan Tersusunanya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen	2 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen	276.506.536	276.506.536	71.478.895	-205.027.642			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		430.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	116.932.015	116.932.015	36.844.895	-80.087.121	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			180.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.006	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd																		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd				4 Laporan	4 Laporan	108.861.993	108.861.993	29.070.000	-79.791.993	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			200.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan Dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	50.712.528	50.712.528	5.564.000	-45.148.528	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Soak Baru	Pajak Daerah	-	-			50.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd Terpenuhinya Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Asn Tersusunanya Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Tersusunanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Skpd				1 Laporan 1 Tahun 200 Dokumen 4 Laporan	1 Laporan 1 Tahun 200 Dokumen 4 Laporan	28.248.369.380	26.985.081.075	39.464.261.429	11.215.892.049			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		31.044.173.725	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn																		



			Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn				200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan	28.248.369.380	26.985.081.075	39.464.261.429	11.215.892.049	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh) Dau Tambahan Dukungan Pendaan Atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	-	-			31.044.173.725	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-				-	-	699.536.992	699.536.992	632.361.992	-67.175.000			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		1.200.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd				2 Dokumen	2 Dokumen	599.969.992	599.969.992	581.113.992	-18.856.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			950.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd				1 Laporan	1 Laporan	99.567.000	99.567.000	51.248.000	-48.319.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			250.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Tersedianya Administrasi Kepegawaian Setda Kab. Muba Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya				100 % 12 Paket 143 Orang 2 Dokumen 300 Orang	100 % 12 Paket 143 Orang 2 Dokumen 300 Orang	1.381.008.641	1.381.008.641	904.212.601	-476.796.040			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		2.270.000.000	Sekretariat Daerah



	4.01.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				12 Paket	12 Paket	371.130.540	371.130.540	191.170.000	-179.960.540	Kab. Musi Banyuas in, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daera h	-	-			500.000.000	Sekretri at Daerah
	4.01.01.2.05.00 03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	99.940.000	99.940.000	41.927.500	-58.012.500	Kab. Musi Banyuas in, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Pajak Daera h	-	-			170.000.000	Sekretri at Daerah
	4.01.01.2.05.00 09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan				143 Orang	143 Orang	809.445.000	809.445.000	570.622.000	-238.823.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Pajak Daera h Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			1.500.000.000	Sekretri at Daerah
	4.01.01.2.05.00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	100.493.101	100.493.101	100.493.101	0	Kab. Musi Banyuas in, Sekayu, Semua Kel/Des a	Pajak Daera h	-	-			100.000.000	Sekretri at Daerah



4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Persentase Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Muba Expo Di Kabupaten Musi Banyuasin Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd Terpenuhiya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian/Mingguan, Tabloid) Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Souvenir, Cindra Mata, Pakaian Ternak Dan Sewo Peralatan				100 % 10 Paket 11 Paket 12 Bulan 1 Paket 20 Laporan 26 Paket 4 Paket	100 % 10 Paket 11 Paket 12 Bulan 1 Paket 20 Laporan 26 Paket 4 Paket	19.070.869.953	18.938.497.830	18.426.556.136	-644.313.817			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		22.845.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	349.888.373	349.888.373	449.888.373	100.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			500.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				68 0	68 0	3.296.560.533	3.304.908.843	3.299.611.372	3.050.839	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			2.900.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		



			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	1.464.194.245	-35.805.755	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			2.600.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	1.271.852.997	1.276.392.564	795.926.744	-475.926.253	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.200.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	979.453.050	979.453.050	800.393.343	-179.059.707	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	-	-			1.200.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	150.000.000	189.043.800	39.043.800	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			200.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.680.000	40.680.000	40.680.000	0	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	-	-			45.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		



			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000.000	5.915.000.000	7.597.867.505	1.597.867.505	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			6.900.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd				12 Laporan	12 Laporan	5.482.435.000	5.422.175.000	3.788.950.755	-1.693.484.245	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			7.300.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	9.216.752.364	4.235.489.792	7.661.172.562	-1.555.579.803			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		13.950.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	8.464.313.000	3.477.153.000	6.940.389.880	-1.523.923.120	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			12.500.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	752.439.364	758.336.792	720.782.682	-31.656.683	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.450.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	15.957.100.368	14.572.370.714	18.929.176.208	2.972.075.840			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		22.603.024.088	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik																		



			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.694.533.480	4.544.533.480	6.357.739.808	1.663.206.328	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			8.100.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.262.566.888	10.027.837.234	12.571.436.400	1.308.869.512	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			14.503.024.088	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Rumah Jabatan Dan Rehab Gedung Kantor Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor				117 Unit 2 Paket 561 Unit	117 Unit 2 Paket 561 Unit	12.389.099.650	12.349.559.650	12.574.310.760	185.211.110			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		13.811.414.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya				117 Unit	117 Unit	5.643.522.400	5.603.982.400	5.833.214.900	189.692.500	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			5.831.414.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	4.663.483.000	4.663.483.000	4.822.905.860	159.422.860	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-Lain Pad Yang Sah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			4.700.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya																		



			<i>Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				561 Unit	561 Unit	2.082.094.250	2.082.094.250	1.918.190.000	-163.904.250	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.280.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	<i>Terlaksananya Medical Check Up Kdh/Wkdh Terpenuhiya Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kdh/Wkdh Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kdh/Wkdh Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Bagi Kdh/Wkdh</i>				12 Bulan 2 Orang 2 Paket	12 Bulan 2 Orang 2 Paket		1.364.828.640	1.364.828.640	1.916.868.640	552.040.000			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		1.380.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.00 01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah																			
		<i>Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan		357.788.640	357.788.640	357.788.640	0	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			350.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah																			
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket		398.440.000	398.440.000	751.480.000	353.040.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			400.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.00 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah																			
		<i>Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang	2 Orang		8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			30.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.11.00 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah																			



			<i>Jumlah Orang Yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</i>				2 Orang/Bu Lan	2 Orang/Bu Lan	600.000.000	600.000.000	799.000.000	199.000.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			600.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	7.100.000.000	7.100.000.000	8.835.541.948	1.735.541.948			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		9.170.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.00 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.300.000.000	4.300.000.000	5.111.817.948	811.817.948	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			5.970.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.00 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.500.000.000	1.500.000.000	2.205.750.000	705.750.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			1.500.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.12.00 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			<i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.300.000.000	1.300.000.000	1.517.974.000	217.974.000	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah	-	-			1.700.000.000	Sekretariat Daerah



4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tercapainya Indeks Persepsi Reformasi Dan Birokrasi Se Kabupaten Muba Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Keselarasan Dokumen Iku, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Dan Cascading Perangkat Daerah, Laporan Dokumen Lkjj, Dan Fasilitasi Pelaksanaan Sakip) Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Terlaksananya Seleksi Evaluasi Kinerja Kecamatan (3 Kecamatan Terbaik) Terpenuhinya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran. Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Ketatalaksanaan Tersusunnya Lkpj Bupati Muba Ta. 2024, Lppd Dan Rlppd Kab. Muba Tahun 2024, Laporan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kab. Muba Tahun 2024				15 Kecamatan 2 Dokumen 3 Laporan 48 Perangkat Daerah 4 Dokumen 60 Perangkat Daerah 8b Predikat	15 Kecamatan 2 Dokumen 3 Laporan 48 Perangkat Daerah 4 Dokumen 60 Perangkat Daerah 8b Predikat	2.701.705.173	2.651.705.173	1.535.905.703	-1.165.799.471			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		5.010.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.00 01	Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan																		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	741.684.540	691.684.540	450.704.550	-290.979.990	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-Lain Penda patan Daerah Yang Sah	-	-			1.900.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.00 02	Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana																		
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	551.169.990	551.169.990	305.748.000	-245.421.990	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			900.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.00 03	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi																		



			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	1.041.913.000	1.041.913.000	602.058.793	-439.854.208	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			1.800.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				40	40	366.937.643	366.937.643	177.394.360	-189.543.283	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			410.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	<i>Persentase Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Yang Terfasilitasi Terdokumentasinya Kegiatan Peringatan Hari Besar Terlaksananya Kegiatan Acara Kdh/Wkdh Terpenuhi Kebutuhan Fasilitasi Staf Ahli Bupati Terpenuhi Penerimaan Kunker Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Tersusunnya Laporan Harian Dan Laporan Triwulan Bupati</i>				100 % 108 Kali 12 Bulan 2 Dokumen 2 Laporan	100 % 108 Kali 12 Bulan 2 Dokumen 2 Laporan	5.708.063.394	5.658.063.394	6.079.285.386	371.221.992			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		8.200.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan</i>				2 Laporan	2 Laporan	2.740.360.000	2.740.360.000	2.460.420.000	-279.940.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			3.600.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		



			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	2.713.172.071	2.663.172.071	3.398.642.180	685.470.109	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Lain-Lain Pad Yang Sah Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			4.300.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	254.531.323	254.531.323	220.223.206	-34.308.117	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah	-	-			300.000.000	Sekretariat Daerah
2	37.347	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Laporan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kabupaten				9 Dokumen	9 Dokumen	14.682.116.173	21.051.766.173	15.455.488.235	5.687.883.827							20.370.000.000	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	2.640.009.356	2.614.659.356	1.526.472.727	-1.113.536.629			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		4.000.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.042.720.030	2.026.070.030	1.241.808.580	-800.911.450	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			2.900.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				10 Dokumen	10 Dokumen	305.325.601	296.625.601	148.230.351	-157.095.250	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			550.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		



			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	291.963.725	291.963.725	136.433.796	-155.529.929	Kab. Musi Banyuas in, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			550.000.000	Sekreta riat Daerah
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pasangan Isbat Nikah Warga Kab. Musi Banyuasin Yang Kurang Mampu Persentase Fasilitasi Kegiatan Yang Mendukung Program Pembangunan Dan Kesra Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten Terbinanya Mental Keagamaan Warga Kab.Muba (Sarjana Bina Desa) Terlaksananya Isbat Nikah Bagi Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Peserta Mtq Terlaksananya Pembinaan Uks Terlaksananya Stqh Tingkat Kabupaten Terlaksananya Stqh Tingkat Provinsi Terlaksananya Tc Peserta Stqh Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitas Pemberangkatan Jamaah Haji Kab. Musi Banyuasin Terselenggaranya Fasilitas Pemberangkatan Jamaah Umroh Kab. Musi Banyuasin				100 Orang 15 Kecamatan 200 Pasang 20 Orang 300 Orang 40 Orang 500 Orang 50 Orang 845 Orang 9 Hari Besar Keagamaa n	100 Orang 15 Kecamatan 200 Pasang 20 Orang 300 Orang 40 Orang 500 Orang 50 Orang 845 Orang 9 Hari Besar Keagamaa n	10.393.937.941	16.823.937.941	12.721.689.941	2.327.752.000			-	-	Sekretari at Daerah Kab. Muba		11.500.000.000	Sekreta riat Daerah
	4.01.02.2.02.00 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasililtasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				6 Dokumen	6 Dokumen	7.174.042.630	13.604.042.630	11.206.927.630	4.032.885.000	Kab. Musi Banyuas in, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			6.500.000.000	Sekreta riat Daerah
	4.01.02.2.02.00 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		



			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Kb				2 Dokumen	2 Dokumen	161.603.745	161.603.745	146.433.745	-15.170.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			1.500.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Yang Meliputi Urusan Kepemudaan Dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	3.058.291.566	3.058.291.566	1.368.328.566	-1.689.963.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			3.500.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Terbentuknya Peraturan Daerah Yang Berkualitas Terlaksananya Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Umum Terlaksananya Penyuluhan Hukum Bagi Narapidana Di Lp Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per-Uu-An Terlaksananya Sosialisasi Ranham Kab. Muba Terselainya Sengketa Hukum Masyarakat Miskin Terselainya Sengketa Hukum (Perdata, Tun, Legal Opinion)				100 Orang 1400 Orang 154 Kasus 2 Kecamatan 34 Kasus 40 Orang 742 Peraturan	100 Orang 1400 Orang 154 Kasus 2 Kecamatan 34 Kasus 40 Orang 742 Peraturan	986.362.128	951.362.128	846.127.567	-140.234.561			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		4.080.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun				742 Dokumen	742 Dokumen	242.762.664	242.762.664	149.012.607	-93.750.057	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			650.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		



			Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				210 Kasus	210 Kasus	657.433.499	622.433.499	619.901.978	-37.531.522	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			2.130.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.003	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi				5 Dokumen	5 Dokumen	86.165.965	86.165.965	77.212.983	-8.952.983	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			1.300.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terfasilitasinya Kerja Sama Dalam Negeri, Meliputi Kerja Sama Daerah Dengan Daerah, Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Terfasilitasinya Kerja Sama Luar Negeri, Meliputi Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Dan Lembaga Luar Negeri Dan Meningkatkan Keaktifan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Keanggotaan Uclg Aspac. Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri Dan Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen	1 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen	661.806.748	661.806.748	361.198.000	-300.608.748			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		790.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04.001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				5 Dokumen	5 Dokumen	282.980.250	282.980.250	142.136.000	-140.844.250	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			300.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04.002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	330.191.498	330.191.498	198.320.000	-131.871.498	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			400.000.000	Sekretariat Daerah



	4.01.02.2.04.00 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				6 Laporan	6 Laporan	48.635.000	48.635.000	20.742.000	-27.893.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-		90.000.000	Sekretariat Daerah
3	37.712	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam				18 8 Laporan Dokumen	18 8 Laporan Dokumen	3.591.113.450	3.547.176.450	2.009.311.975	1.243.886.550						4.835.000.000	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Analisa Perkembangan Dan Pencapaian Kinerja Bumd Dan Blud Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Bumd Dan Blud Terlaksananya Pembinaan Blud Terlaksananya Pembinaan Bumd Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Terlaksananya Survey Bahan Pokok Tersedianya Laporan Monitoring Dan Evaluasi				14 Kecamatan 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Laporan 32 Blud 3 Bumd 4 Laporan	14 Kecamatan 1 Kegiatan 2 Dokumen 2 Laporan 32 Blud 3 Bumd 4 Laporan	682.716.000	647.713.000	316.669.000	-366.047.000			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba	1.000.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumd Dan Blud																	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumd Dan Blud				41 Dokumen	41 Dokumen	251.150.000	240.802.000	121.786.000	-129.364.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-		350.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.00 02	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian																	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian				18 Laporan	18 Laporan	199.874.000	189.868.000	95.759.000	-104.115.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-		300.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.00 03	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	



			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				15 Dokumen	15 Dokumen	231.692.000	217.043.000	99.124.000	-132.568.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			350.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Monitoring Dan Pemeriksaan Fisik Tersusunnya Dokumen Standar Harga Bahan Dan Upah, Harga Barang, Asb Konstruksi, Asb Perhitungan, Asb Permodelan Dan Tapd Tersusunnya Laporan Fasilitas Serah Terima Pekerjaan, Verifikasi Kontrak Dan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (Shstbgn)				15 Laporan 3 Laporan 4 Laporan	15 Laporan 3 Laporan 4 Laporan	1.152.323.000	1.152.323.000	472.647.000	-679.676.000			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		1.470.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.00 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	694.325.000	694.325.000	254.842.000	-439.483.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			1.000.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.00 02	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	296.606.000	296.606.000	148.244.000	-148.362.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			350.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.00 03	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				15 Laporan	15 Laporan	161.392.000	161.392.000	69.561.000	-91.831.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			120.000.000	Sekretariat Daerah



4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	<i>Terlaksananya Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa</i> <i>Terlaksananya Bantuan Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa</i> <i>Terlaksananya Proses Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Lpse</i> <i>Terlaksananya Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Dan Jasa Lainnya Pada Seluruh Opd Dalam Kab. Musi Banyuasin</i> <i>Terlaksananya Proses Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Pada Seluruh Opd Dalam Kab. Musi Banyuasin</i> <i>Terlaksananya Proses Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang Pada Seluruh Opd Dalam Kab. Musi Banyuasin</i>				1 Kasus 1 Pelayanan 23 Orang 30 Paket 40 Paket 435 Paket	1 Kasus 1 Pelayanan 23 Orang 30 Paket 40 Paket 435 Paket	1.116.528.450	1.116.528.450	589.159.975	-527.368.475			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		1.265.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa				505 Dokumen	505 Dokumen	634.717.950	634.717.950	302.621.475	-332.096.475	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			750.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	274.468.500	274.468.500	189.864.500	-84.604.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			265.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa																		
		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa				23 Orang	23 Orang	207.342.000	207.342.000	96.674.000	-110.668.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			250.000.000	Sekretariat Daerah



	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	639.546.000	630.612.000	630.836.000	-8.710.000			-	-	Sekretariat Daerah Kab. Muba		1.100.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan Dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Kukm, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				5 Dokumen	5 Dokumen	39.990.000	31.056.000	15.571.000	-24.419.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			150.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan Dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				5 Dokumen	5 Dokumen	444.834.000	444.834.000	388.048.000	-56.786.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			800.000.000	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.00 03	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi Dan Air, Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				5 Dokumen	5 Dokumen	154.722.000	154.722.000	227.217.000	72.495.000	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (Dbh)	-	-			150.000.000	Sekretariat Daerah
		J U M L A H							122.387.070.714	120.811.591.060	134.495.932.469	820.096.150.970							157.118.611.813	



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2025 Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin disusun sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Dokumen ini merupakan perencanaan tahunan yang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah serta berfungsi sebagai dasar dalam menetapkan prioritas program dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah.

Sebagai unsur staf yang berada langsung di bawah Bupati, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi antar perangkat daerah. Melalui pelaksanaan 3 program, 20 kegiatan, dan 64 subkegiatan yang ditetapkan pada tahun berjalan, Sekretariat Daerah diharapkan mampu mendorong efektivitas kerja pemerintahan serta pelayanan administratif yang lebih baik dan terarah.

Upaya pencapaian tujuan pembangunan melalui dokumen Renja-P ini juga mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam menyesuaikan program dan kegiatan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, regulasi terbaru, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Dengan perencanaan yang terfokus,

partisipatif, dan responsif, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan secara optimal dan berkelanjutan.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

1. Penajaman Skala Prioritas

Diperlukan penentuan skala prioritas yang lebih tajam dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak, guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian target kinerja Sekretariat Daerah.

2. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya penunjang, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, perlu dioptimalkan agar pelaksanaan kegiatan lebih efisien dan tepat sasaran.

3. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Internal

Diperlukan peningkatan koordinasi antar bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, khususnya dalam inventarisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan dan untuk memastikan kesinambungan antar unit kerja.

4. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Perangkat Daerah

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, keberhasilan pelaksanaan Renja membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat daerah. Oleh

karena itu, kolaborasi lintas sektor dan pendekatan partisipatif harus terus diperkuat.

Dengan upaya dan komitmen yang sungguh-sungguh, dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga menjadi landasan nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.